



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : KOMISI YUDISIAL

UNIT KERJA : ANGGOTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABHAN**
2. Jabatan : **ANGGOTA KOMISI YUDISIAL**
3. NHK : **456301**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 6.525.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 486 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 74 m2/60 m2 di KAB / KOTA PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 238 m2/175 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 705.500.000**

1. MOTOR, HONDA NC12AF2CBI A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA AFX12U21C08 M/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO KIH02N14LO A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
4. MOBIL, MAZDA 2 SDN 1.5L S A/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000



5. MOBIL, TOYOTA RUSH RUSH 1.5 SAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
6. MOBIL, HYUNDAI CRETA CRETA PRIME 1.5 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
7. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.580.839.962
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	8.811.339.962
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.811.339.962

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.